

PERAN BPKP DALAM PENURUNAN TINGKAT KORUPSI



**PUSLITBANGWAS
BPKP**

PERAN BPKP DALAM PENURUNAN TINGKAT KORUPSI

Latar Belakang



Gambar 1.1 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia

Sumber: Transparency International Indonesia (2021).

Korupsi masih menjadi permasalahan besar di Indonesia karena dari riset *Transparency International Indonesia*, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2021 adalah 38 dari skala 0 terburuk sampai dengan 100 terbaik. Indonesia hanya menempati peringkat 98 dari 180 negara yang di survei. Tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 3 negara terkorup dari negara-negara G20.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dengan skor IPK 38, apakah BPKP telah berkontribusi secara signifikan dalam memberantas korupsi merupakan alasan kedua kajian ini dilakukan? Problematika kajian ini adalah sejauh mana efektivitas peran BPKP dalam menurunkan tingkat korupsi yang berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menilai efektivitas BPKP dalam menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Manfaatnya untuk mendorong kinerja BPKP agar semakin bermanfaat bagi stakeholders, menyadarkan para APIP Daerah lebih efektif dalam pencapaian kinerja organisasi, memberi peringatan dini dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini dibatasi hanya pada tahun 2021 dan hanya pada Pemda Kabupaten dan Kota tanpa Provinsi. Kajian kali ini hanya memasukkan variabel hasil binaan BPKP berupa Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Capaian Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.

Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Audit Internal

Menurut Masyitoh dkk. (2015), audit internal yang baik mampu menjalankan fungsi deteksi kecurangan, perilaku korupsi, dan meningkatkan kinerja instansi. KPK ingin agar independensi BPKP dan APIP lainnya dapat

ditingkatkan sehingga akan lebih memperkuat sistem pencegahan korupsi. Perbaikan yang dihasilkan dari hasil kegiatan pengawasan selama ini dirasa masih belum signifikan dan kurang banyak memberi nilai tambah.

1. Maturitas SPIP

Tingkat maturitas pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diperoleh melalui proses penilaian SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen, yaitu; kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Semakin matang SPIP-nya maka akan semakin tercegah terjadinya korupsi.

2. Kapabilitas APIP

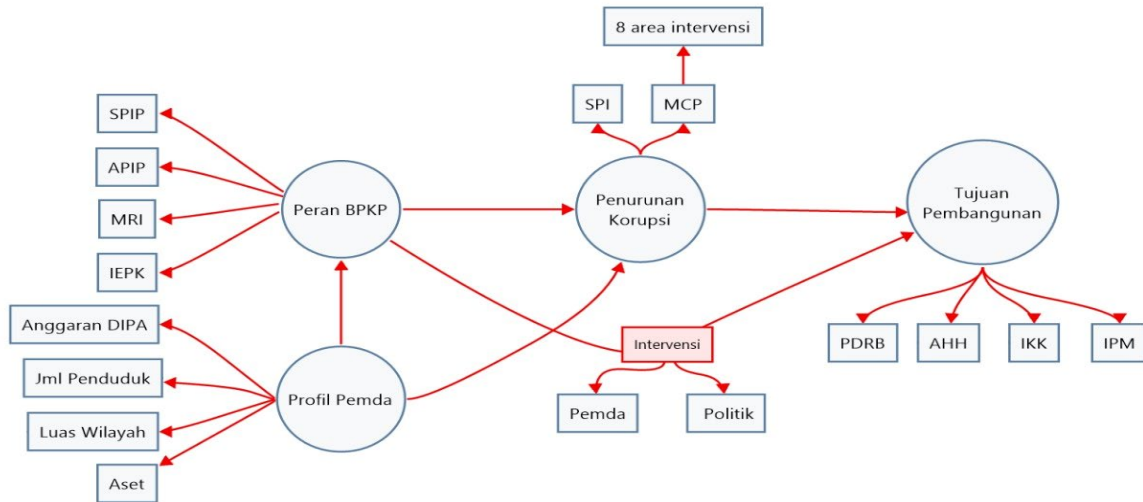
Semua (enam) elemen kapabilitas APIP yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola dinilai dengan menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan untuk seluruh KPA (41 KPA). BPKP berperan membina APIP agar kapabel sehingga mencapai level 5. Semakin level tercapai tinggi maka semakin berhasil peran BPKP. Dengan demikian, semakin kapabel Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya, maka semakin turun terjadinya korupsi.

Pengaruh Korupsi terhadap tujuan pembangunan manusia

Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Kajian ini hanya membatasi pada dampak korupsi pada aspek kehidupan sosial masyarakat dan individu serta yang kami sebut sebagai tujuan pembangunan yaitu Angka Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kerangka Berpikir

Kajian ini mempunyai kerangka berpikir seperti dibawah ini.



Kerangka atau model ini memiliki 4 variabel laten dan 22 variabel manifes. Variabel tersebut adalah:

1. Variabel Profil Pemda

Profil Pemda direfleksikan dengan variable manifest:

- a. Anggaran
- b. Jumlah Penduduk
- c. Luas Wilayah
- d. Jumlah Aset yang dimiliki

2. Variabel Peran BPKP.

Peran BPKP direfleksikan dengan variable manifest):

- a. Maturitas SPIP
- b. Kapabilitas APIP
- c. Capaian Manajemen Risiko
- d. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

3. Variabel Penurunan Korupsi

Penurunan Korupsi direfleksikan dengan variable manifest:

- a. Integritas personil dan organisasi yang baik
- b. Tata Kelola Organisasi yang baik khusus pada:
 - 1) Perencanaan dan Penganggaran APBD,
 - 2) Pengadaan Barang dan Jasa,
 - 3) Perijinan,
 - 4) Pengawasan oleh Inspektorat Daerah,
 - 5) Manajemen Aparatur Sipil Negara,
 - 6) Optimalisasi Pajak Daerah,
 - 7) Manajemen Aset Daerah,
 - 8) Tata Kelola Keuangan Desa

4. Variabel Tujuan Pembangunan.

Tujuan pembangunan direfleksikan dengan variable manifest:

- a. Angka Harapan Hidup (AHH) Masyarakat,

- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
- c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK)
- d. Persentase Penduduk Miskin
- e. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pengembangan Hipotesis

Hipotesa yang dikembangkan dalam kajian ini ada beberapa yaitu:

1. Pengaruh Profil Pemda terhadap peran BPKP yang efektif

Luas wilayah yang semakin luas, Jumlah penduduk yang semakin banyak, Jumlah Aset yang banyak/besar dan Anggaran pemda yang besar dapat berpeluang terjadinya korupsi. Sehingga peran BPKP akan terpengaruh

H1: Profil Pemda berpengaruh terhadap efektivitas peran BPKP

2. Pengaruh Peran BPKP dalam menurunkan/mengurangi Korupsi

Pasal 11 PP No. 60 tahun 2008, BPKP sebagai APIP perannya akan efektif apabila dapat a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

H2: Peran BPKP berpengaruh terhadap penurunan korupsi

3. Pengaruh turunnya/berkurangnya Korupsi terhadap pencapaian tujuan pembangunan

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang dasar'45. Hal ini dipengaruhi oleh penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.

H3: Penurunan Korupsi berpengaruh terhadap tujuan pembangunan

Jenis Penelitian

Penelitian ini menjelaskan hubungan sebab akibat antar variable yang diteliti menggunakan Structural Equation Modelling (SEM).

Obyek Penelitian

Obyek penelitian menggunakan data sekunder atas pelaksanaan Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko (MR), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), integritas dan MCP dampaknya pada penurunan korupsi dan tercapainya tujuan pembangunan.

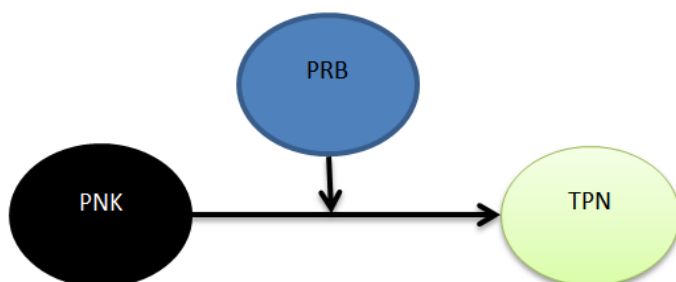
Variabel penelitian dan definisi operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan definisi operasionalnya sebagai berikut:

OPERASIONALISASI VARIABEL OPERASIONAL

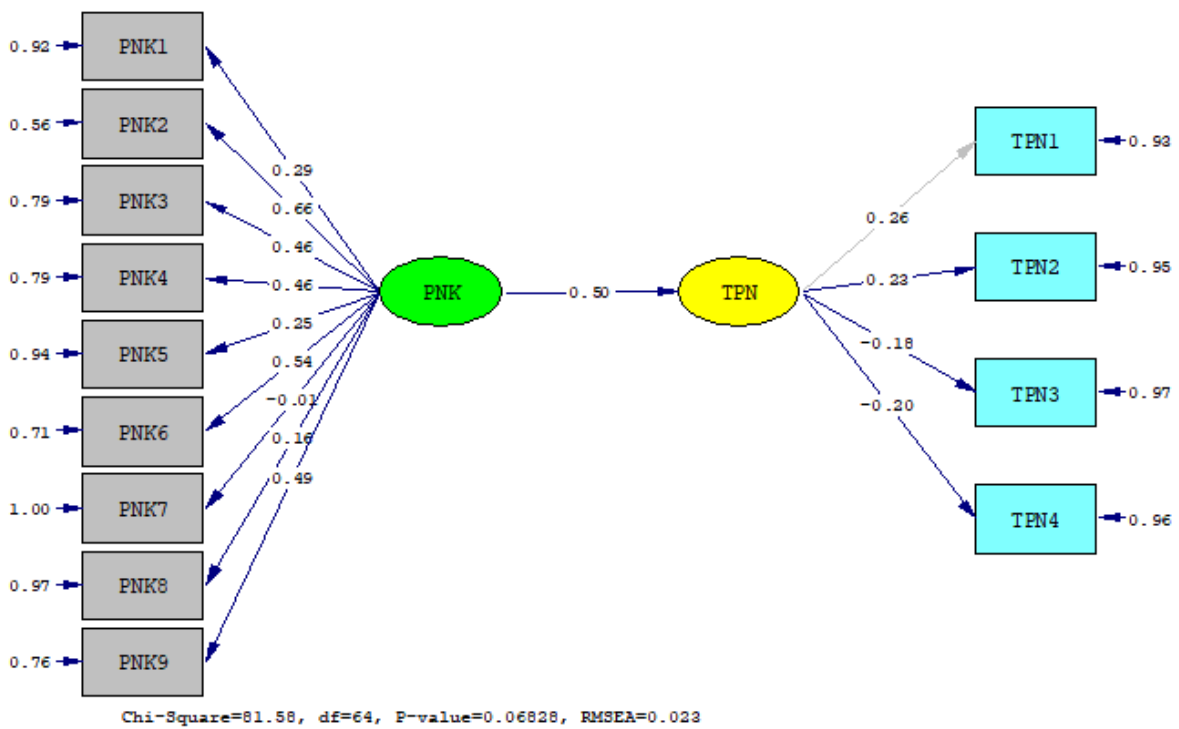
VARIABEL LATEN		VARIABEL MANIFES	
Peran BPKP	PRB		
		Maturitas SPIP	PRB1
		Kapabilitas APIP	PRB2
		Manajemen Risiko (MR)	PRB3
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	PRB4
		Kapabilitas APIP	PRB2
Penurunan Korupsi	PNK		
		Integritas (SPI)	PNK1
		Perencanaan dan Penganggaran APBD	PNK2
		Pengadaan Barang dan Jasa	PNK3
		Perizinan	PNK4
		Pengawasan APIP	PNK5
		Manajemen ASN	PNK6
		Optimalisasi Pajak Daerah	PNK7
		Manajemen Aset Daerah	PNK8
Tujuan Pembangunan	TPN		
		Angka Harapan Hidup (AHH)	TPN1
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	TPN2
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK)	TPN3
		% Penduduk Miskin	TPN4

Model Penelitian



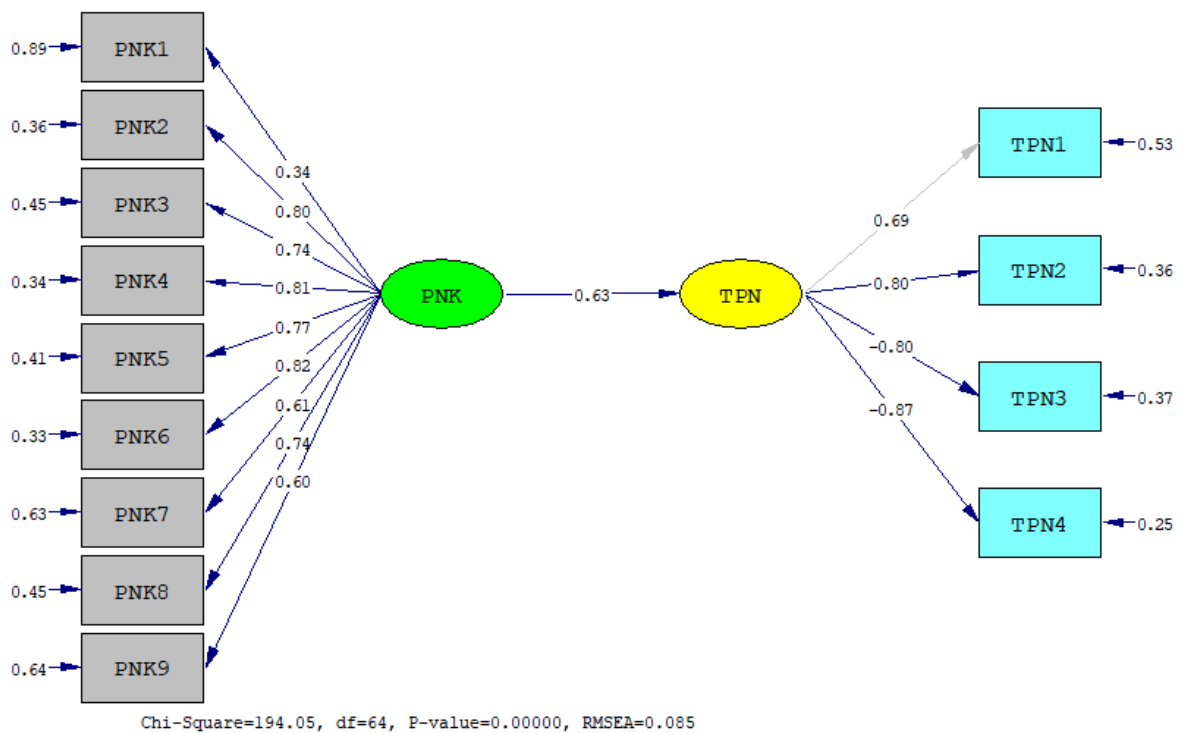
Hasil Pengukuran

Hasil Gabungan



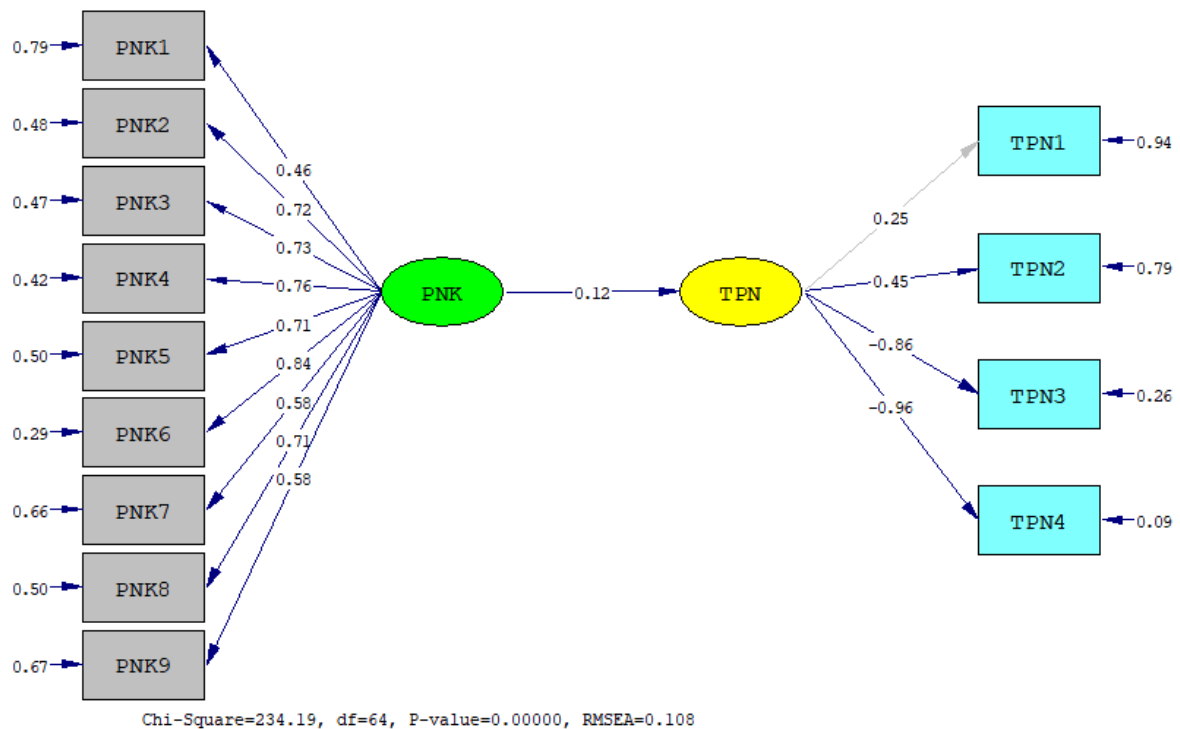
Peran Kecil

yaitu Jumlah Maturitas SPIP+Kapabilitas APIP+Manajemen Risiko (MR)+Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) ≤ 8



Peran Besar,

yaitu Jumlah Maturitas SPIP+Kapabilitas APIP+Manajemen Risiko (MR)+Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) > 8



Hasil pengujian menyimpulkan semakin baik peran BPKP atas variabel yang Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko (MR), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) berdampak pada penurunan pengaruh korupsi dalam pelaksanaan pemangunan nasional.

No	Status Kab/Kota	Pengaruh Penurunan Korupsi pada Tujuan Pembangunan Nasional
1	Kecil, Jumlah Maturitas SPIP+Kapabilitas APIP+Manajemen Risiko (MR)+Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) ≤ 8	0,63
2	Gabungan Kecil dan Besar	0,50
3	Besar, Jumlah Maturitas SPIP+Kapabilitas APIP+Manajemen Risiko (MR)+Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) > 8	0,12

Makin meningkatnya peran BPKP ditunjukkan dengan Jumlah Maturitas SPIP+Kapabilitas APIP+Manajemen Risiko (MR)+Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) ≤ 8 digambarkan pada kondisi pemerintah daerah dengan tata Kelola yang belum baik berisiko terjadi korupsi yang material sehingga pengaruh pengawasan BPKP signifikan sebesar 0,63 atas terjadinya korupsi.

Sebaliknya, peran BPKP makin baik pada sistem tata Kelola unit pemerintah daerah ditunjukkan dengan Jumlah Maturitas SPIP+Kapabilitas APIP+Manajemen Risiko (MR)+Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) tercapai diatas 8 maka korupsi yang terjadi semakin kecil sehingga pengaruh pengawasan BPKP pada penurunan korupsi sebesar 0,12 atas terjadinya korupsi.

Kesimpulan

1. BPKP telah tepat melaksanakan pengawasan berfokus pada perbaikan tata Kelola, risiko, control pada pelaksanaan kerja.
2. Hal ini dibuktikan dengan makin bagusnya peran BPKP mendorong makin kecilnya penurunan korupsi.

Saran dan Rekomendasi

Dalam tujuan penurunan korupsi, BPKP mengambil lingkup peran dan layanan atas fungsi *assurance* berkelas dunia .